

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala pemerintahan yang terus diterapkan melalui rezim orde lama, orde baru, hingga sekarang tidak menerapkan dukungan partai pada pemilihan kepala desa (pilkades). Dalam Tawakkal (2017) pilkades tidak melibatkan partai, berbeda dengan Pilkada atau Pilpres yang membutuhkan dukungan partai. Konsekuensi format yang berbeda adalah calon kepala desa tidak memiliki mesin politik yang siap digunakan untuk mobilisasi pemilih. Dampak negatif yang diakibatkan format yang berbeda diantaranya:

1. Fragmentasi Pemilih: Tanpa partai, pemilih mungkin lebih cenderung memilih berdasarkan faktor-faktor sosial, agama, atau budaya yang lebih sempit.
2. Kualitas Kepemimpinan: Kehadiran partai politik dapat memberikan lebih banyak kontrol dan kriteria seleksi terhadap calon kepala desa. Tanpa partai, ada risiko bahwa calon yang terpilih mungkin tidak memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk memimpin dengan efektif.
3. Kemungkinan Politik Uang: Tanpa struktur partai yang mengatur dan mengawasi calon, ada potensi untuk meningkatnya praktik politik uang, suap, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan pemilihan.
4. Personalisasi Politik: Tanpa partai, pemilihan kepala desa cenderung lebih dipersonalisasi. Pemilih mungkin lebih condong pada memilih berdasarkan

karakter dan popularitas calon daripada pada platform dan rencana kerja mereka.

Calon kepala desa dihadapkan pada kenyataan harus membangun mesin politik sendiri. Calon kepala desa harus bisa memanfaatkan elemen yang ada di masyarakat desa untuk membangun mesin politik yang kuat, mampu memobilisasi pemilih. Tak jarang, mesin politik lebih menentukan ketimbang calon kepala desa itu sendiri.

Calon kepala desa harus bisa memanfaatkan elemen yang ada di masyarakat desa untuk membangun mesin politik yang kuat, mampu memobilisasi pemilih. Mesin mobilisasi politik dalam pemilihan kepala desa adalah upaya untuk memenangkan pemilihan kepala desa melalui strategi yang melibatkan berbagai langkah dalam upaya menggerakkan dan memobilisasi dukungan politik dari masyarakat desa. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Pemetaan wilayah: Tim kampanye akan memetakan wilayah desa untuk mengetahui siapa-siapa yang potensial menjadi pendukung calon kepala desa. Pemetaan ini biasanya didasarkan pada kriteria seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya.
2. Penggalangan dukungan: Setelah wilayah terpeta, calon kepala desa dan tim kampanye akan melakukan penggalangan dukungan dari masyarakat desa. Cara-cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, seperti berkampanye secara langsung, melakukan pertemuan dengan warga desa, atau memasang spanduk dan baliho kampanye di sekitar desa.

3. Pembentukan relawan: Calon kepala desa dan tim kampanye juga akan membentuk relawan untuk membantu dalam kampanye dan pemungutan suara. Relawan biasanya terdiri dari pendukung calon kepala desa yang memiliki pengaruh dan kredibilitas di masyarakat desa.
4. Pemantauan pemungutan suara: Setelah seluruh tahap kampanye dilakukan, calon kepala desa dan tim kampanye akan memantau pemungutan suara untuk memastikan bahwa dukungan politik yang sudah mereka dapatkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk suara yang sah.

Bentuk mesin mobilisasi politik dalam pemilihan kepala desa dapat beragam, tergantung pada strategi yang digunakan oleh calon kepala desa dan tim kampanyenya. Bentuk mesin mobilisasi politik dapat berupa perwiridan bapak-bapak maupun ibu-ibu, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan pengusaha, perkumpulan pemuka agama, dan sebagainya.

Pada tahun 2022 telah digelar pemilihan kepala desa Naga Timbul, 5 calon yang maju sebagai calon masing-masing yaitu Elis Dawani Siregar, Sarju, Ratna Sulastri, Rajali Ahmad AM, Terimo. Hasil pemilihan kepala desa Naga Timbul menunjukkan terpilihnya Terimo sebagai kepala desa. Sebelum pemilihan dimulai para calon masing-masing diberikan waktu untuk mengkampanyekan dirinya sesuai waktu yang telah ditentukan oleh panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa. Seperti cakades nomor urut 1 yang menggunakan mesin mobilisasi politik teman-teman lama yang telah bersama cakades sejak beliau menjabat menjadi cakades dulu. Cakades Nomor 5 yang menggunakan mesin mobilisasi politik dengan membentuk tim sukses yang diketuai oleh saingan lama ketika mencalonkan

sebagai kepala desa periode yang lalu, dengan anggota tim suksesnya yang sudah dibina oleh ketua tim suksesnya sendiri.

Pada pemilu tersebut, calon kepala desa nomor urut 1, Elis Dawani Siregar, menggunakan mesin mobilisasi politik yang melibatkan orang-orang lama yang telah tinggal di desa sejak lahir. Hal ini menciptakan permasalahan penting terkait kontinuitas dalam politik desa, di mana mesin politik tersebut berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dominasi kelompok yang telah lama berkuasa. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan orang-orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota panitia pemilihan dalam mesin politik Elis Dawani. Keterlibatan mereka dalam kampanye politik mengindikasikan pelanggaran etika dan integritas dalam proses pemilihan, yang dapat mengganggu keseimbangan persaingan politik serta menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses pemilih sasaran calon kepala desa nomor urut 5, Terimo, yang menyebabkan banyaknya surat suara tidak dibagikan kepada mereka.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana penggunaan mesin mobilisasi politik yang melibatkan anggota BPD dan anggota panitia pemilihan dapat mengakibatkan hilangnya hak suara bagi pemilih sasaran calon kepala desa nomor urut 5, Terimo. Keterlibatan anggota BPD dan panitia pemilihan dalam mesin politik menimbulkan konflik kepentingan yang serius, yang berpotensi menggoyahkan integritas pemilihan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratisasi di desa tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang adil, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas politik di tingkat desa.

Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang permasalahan ini di Desa Naga Timbul sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan kepala desa. Hal ini menegaskan perlunya perubahan dalam praktek politik di tingkat lokal, yang memastikan bahwa semua calon kepala desa memiliki akses yang setara dan adil dalam memperebutkan dukungan pemilih. Analisis mesin mobilisasi politik dalam kasus ini akan memberikan wawasan berharga tentang tantangan demokratisasi di tingkat desa dan konsekuensinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mesin mobilisasi politik cakades nomor urut 1 dan 5 pada pemilihan kepala desa.
2. Keterlibatan BPD dan panitia pemilihan kepala desa sebaga mesin mobilisasi politik cakades nomor urut 1.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada mesin mobilisasi politik cakades nomor urut 1 dan 5 pada pemilihan kepala desa dalam memobilisasi pemilih pada pemilihan kepala desa di desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Sumatera Utara tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mesin mobilisasi politik cakades nomor urut 1 dan 5 pada pemilihan kepala desa dalam memobilisasi pemilih pada pemilihan kepala desa di desa Naga

Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Sumatera Utara tahun 2022.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis bagaimana mesin mobilisasi cakades nomor urut 1 dan 5 pada pemilihan kepala desa dalam memobilisasi pemilih pada pemilihan kepala desa di desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Sumatera Utara tahun 2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan literatur tentang pemilihan kepala desa di negara berkembang dalam konteks desentralisasi dengan mengeksplorasi bagaimana pemilihan kepala desa di Indonesia para calon membentuk mesin untuk memobilisasi pemilih. Dengan mengatasi kesenjangan penelitian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih besar tentang apa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, memperdalam demokrasi di tingkat lokal dengan memperbaiki sistem pemilu lokal, dan memberikan kontribusi untuk pengetahuan kita tentang proses pemilu lokal di Indonesia dan negara berkembang lainnya yang terlibat dalam desentralisasi demokratis.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya dalam bidang politik, sosial dan

pendidikan kewarganegaraan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang manfaat ilmiah penelitian.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada pemerintah, terkhusus meningkatkan kinerja mesin-mesin politik lainnya di tingkat lokal, memperdalam demokrasi di tingkat lokal dengan memperbaiki sistem pemilu lokal.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian penambah informasi kepada masyarakat Indonesia tentang proses pemilihan lokal di Indonesia.